



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG  
SATU DATA INDONESIA KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan serta dikelola secara seksama terintegrasi dan berkelanjutan, diperlukan perbaikan tata kelolah data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menegaskan perbaikan tata kelolah data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan rangka penyelenggaraan satu dataa Indonesia;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Prembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
14. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA KABUPATEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Majene.
6. Satu Data Indonesia Kabupaten Majene adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

8. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
15. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Majene.
16. Data Warehouse adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan data yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan data
18. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Majene adalah media bagi-pakai data di tingkat pemerintah daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data adalah instansi vertikal lembaga tingkat pusat dan daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan data terkait.
20. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data
21. Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur TIK, penyebaran informasi, dan keamanan informasi.

22. Walidata Pendukung Verifikator prinsip satu data adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Majene dan materi konten.
23. Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten data.
24. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
25. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Majene dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Majene bertujuan untuk :
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. jenis dan sumber data;
  - b. prinsip satu data;

- c. penyelenggara satu data;
- d. pola komunikasi satu data;
- e. penyelenggaraan satu data kabupaten Majene;
- f. pendanaan; dan
- g. partisipasi pihak lain.

## BAB IV JENIS DAN SUMBER DATA

### Bagian Kesatu Jenis Data

#### Pasal 4

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. statistik Dasar;
  - b. statistik Sektoral; dan
  - c. statistik Khusus.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup daerah.
- (4) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (6) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. informasi Geospasial Dasar; dan
  - b. informasi Geospasial Tematik.
- (7) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
- (8) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

#### Pasal 5

- (1) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), data dikelompokkan dalam :
  - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. data yang bersifat rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### Bagian Kedua

#### Sumber Data

#### Pasal 6

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik Sektorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau Instansi lainnya diluar Pemerintah Daerah melalui kemitraan dan kerja sama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

### BAB V

### PRINSIP SATU DATA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

Satu Data Indonesia Kabupaten Majene harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua  
Standar Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 9

Standar Data lintas Perangkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga  
Metadata

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.



#### Pasal 11

Struktur dan format yang baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk data lintas Perangkat Daerah mengacu pada struktur dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

#### Bagian Keempat Interoperabilitas Data

#### Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Data harus :
  - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

#### Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

#### Pasal 13

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

### BAB VI PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MAJENE

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Majene dilaksanakan oleh :

- a. pembina data;
- b. walidata tingkat daerah;
- c. walidata pendukung tingkat daerah; dan
- d. produsen Data.

#### Bagian Kedua Pembina Data

#### Pasal 15

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas :
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Majene sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Daerah;
  - b. pembina Data Geospasial yaitu perangkat daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh :
  - a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- (4) pembina data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Walidata Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas :
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia Kabupaten Majene, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Daerah hanya memiliki 1 (satu) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Walidata.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang yang mengurus urusan statistik pada Dinas.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat  
Walidata Pendukung Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Walidata Tingkat Daerah dibantu oleh Walidata Pendukung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian*;
- b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
- c. Walidata Pendukung Validator konten.

Pasal 18

- (1) Walidata Pendukung tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. membantu Walidata tingkat daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Dinas Kominfo Kabupaten Majene;
  - b. bidang Komunikasi Dan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Majene;
  - c. seksi Keamanan Informasi Daerah pada Dinas.
- (3) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majene untuk data terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKPIJ);
  - b. badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah untuk data terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPIJ), dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); dan
  - c. bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majene untuk data terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- (4) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c adalah Produsen Data.
- (6) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Produsen Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Majene; dan
  - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (3) Produsen Data bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.

#### Pasal 20

- (1) Produsen Data terdiri atas :
  - a. kepala;
  - b. sekretaris; dan
  - c. dibantu dua orang Administrator atau Operator Data.
- (2) Struktur keanggotaan tiap Produsen Data ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah
- (3) Dalam hal data dimiliki oleh lebih dari satu Produsen Data maka keanggotaan Produsen Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

#### POLA KOMUNIKASI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MAJENE

##### Bagian kesatu

##### Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene

#### Pasal 21

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Majene mengenai :
  - a. penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. penentuan data yang akan disimpan dalam data warehouse;
  - c. lokasi pusat data daerah;
  - d. pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata, penyebaran data, dan membahas pembatasan akses data;

- e. praktik pemanfaatan dan tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Majene;
  - f. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene secara teratur; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Majene secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Majene.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 22

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene terdiri atas :
- a. Pembina Data;
  - b. Walidata; dan
  - c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (4) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene meminta arahan Bupati.

#### Bagian Kedua

##### Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

#### Pasal 23

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Majene.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Majene mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Majene bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN MAJENE

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Majene terdiri atas :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. penyimpanan data; dan
- e. penyebarluasan data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 25

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene dan/atau atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar data yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 26

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
  - a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat :
  - a. produsen Data untuk masing-masing data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene kepada seluruh anggota Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Majene.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 27

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan :
  - a. standar Data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene; dan
  - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 28

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- (2) Walidata menginformasikan Data yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Majene dan Validator Konten.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
  - a. data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 29

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Verifikator prinsip Satu Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Majene.
- (2) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Validator Konten memeriksa keakuratan konten data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Majene, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima  
Penyimpanan Data

Pasal 30

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian menyimpan Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Majene ke dalam Data Warehouse yang tersimpan di pusat data Daerah.

- (2) Data yang disimpan dalam Data Warehouse dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene.
- (3) Data yang disimpan berupa satuan-satuan data yang terintegrasi.
- (4) Data yang disimpan dalam Data Warehouse menjadi referensi dalam penentuan kecerdasan bisnis dalam mengambil keputusan.

#### Bagian Keenam Penyebarluasan Data

##### Pasal 31

- (1) Walidata melaksanakan penyebarluasan data.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian menyebarluaskan data yang membutuhkan integrasi data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (4) Hasil penyebarluasan data dikomunikasikan oleh Walidata ke seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Majene.
- (5) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Majene, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

##### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Majene.
- (2) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan akses:
  - a. kode referensi;
  - b. data induk;
  - c. data;
  - d. metadata;
  - e. data Prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemuatkhiran Data.
- (3) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Walidata.
- (4) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene.
- (5) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Majene.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.



- (7) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 33

Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dilaksanakan oleh :

- a. walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat; dan
- b. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat.

#### Pasal 34

- (1) Pengguna Data yang mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Majene tidak dipungut biaya.
- (2) Akses data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB IX

#### PENDANAAN

#### Pasal 35

Pendanaan pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Majene bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### PARTISIPASI PIHAK LAIN

#### Pasal 36

Pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Majene meliputi :

- a. partisipasi Lembaga Negara;
- b. partisipasi Badan Hukum Publik;
- c. partisipasi Masyarakat; dan
- d. partisipasi Pelaku Usaha.

#### Pasal 37

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Majene, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya yang wilayah kerjanya berada di Daerah.

- (2) Kerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dari kalangan manapun yang tidak terkecuali dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan data Satu Data Indonesia Kabupaten Majene.
- (4) Pelaku usaha yang meliputi Swasta, BUMN, Wiraswasta, dan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan data Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Majene.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal, 14 September 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal, 15 September 2022

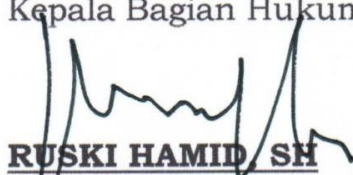
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**RUSKI HAMID, SH**

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19721115 201101 1 001



